



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp (0512) 22384 Pelaihari

Pelaihari, 15 November 2024

Nomor : 700.1.2.7/256/Insp-IrbanIII/ 2024
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP SKPD Wilayah Irban III Triwulan 3 (Tiga))

Yth. Kepala SKPD Wilayah Irban III (Daftar terlampir)
di tempat

Dengan ini disampaikan Laporan Hasil Pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Triwulan 3 (Tiga) Tahun 2024 pada SKPD Wilayah Irban III, dengan uraian sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lemb Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 69);
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 94 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 94);
4. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/757/Insp/2024 tanggal 8 November 2024 Perihal Melakukan Monitoring Rencana Tindak Pengendalian RTP RR Triwulan II.

B. Tujuan

Monitoring Rencana Tindak Pengendalian (RTP) RR SKPD bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian berjalan secara efektif sesuai dengan rencana sehingga risiko yang teridentifikasi tidak terjadi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup monitoring adalah realisasi kegiatan pengendalian intern Triwulan 3 (Tiga) pada SKPD wilayah Irbab III, sebanyak 10 SKPD, yaitu :

1. Inspektorat
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Kecamatan Pelaihari
9. Kecamatan Batu Ampar
10. Kecamatan Bumi Makmur

D. Uraian Hasil Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian berjalan secara efektif sesuai dengan rencana sehingga risiko yang teridentifikasi tidak terjadi. Berdasarkan hasil pemantauan RTP Triwulan 3 (Tiga) Tahun 2024 terdapat catatan sebagai berikut :

1. Inspektorat

Dari Rencana Tindak Pengendalian yang disusun, yang telah dilakukan adalah :

- a) pendampingan ke PD dan evaluator agar terdapat persamaan persepsi
- b) membuat aplikasi sederhana pengawasan yang memuat jadwal dan hasil pengawasan
- c) akan berkoordinasi dengan Kominfo dan BPKP pusat terkait integrasi online Siswaskeudes dan Siskeudes Pemda Tala
- d) akan melaksanakan FGD antara Pemerintah Kab.Tala, Dirjen Minerba, BPK terkait penghapusan temuan Pertambangan 150 M
- e) melaksanakan bimbingan penyusunan rencana aksi RB dengan narasumber dari Kemenpan RB RI

Sedangkan rencana Tindak Pengendalian yang belum dilakukan adalah membuat SOP pengawasan tujuan tertentu, dengan waktu pelaksanaan bulan Juni 2024, agar RTP direalisasikan pada triwulan selanjutnya (Triwulan IV).

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dari Rencana Tindak Pengendalian yang disusun, sudah berjalan yaitu :

- a) Peningkatan Kompetensi SDM pelaksana terkait simonev melalui sosialisasi,
- b) Melaksanakan Bimtek SAKIP

Sedangkan rencana Tindak Pengendalian yang belum dilakukan adalah Pembuatan Perbup RIPDA, yang rencana pelaksanaannya pada bulan November - Desember 2024, agar RTP direalisasikan pada triwulan selanjutnya (Triwulan IV)

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Tindak Pengendalian yang disusun telah dilakukan, yaitu :

- a) Melakukan parenting dan sosialisasi pentingnya PAUD
- b) Melakukan pendekatan kepada pondok pesantren murni agar mau menyelenggarakan pendidikan umum
- c) memenuhi semua kebutuhan sekolah terkait akreditasi sekolah
- d) membentuk TIM Tenaga Ahli Cagar Budaya dan melakukan bimtek

agar Rencana tindak pengendalian untuk risiko tahun 2024 yang sudah berjalan, tetap dilaksanakan secara intensif sehingga risiko yang teridentifikasi dapat diatasi dan tidak muncul kembali menjadi risiko di tahun yang akan datang.

4. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Rencana Tindak Pengendalian sudah berjalan, adalah :

- a) Koordinasi dengan Bulog
- b) Koordinasi dengan penyedia
- c) Koordinasi dengan pedagang pengecer tentang pemberian informasi data yang benar
- d) Koordinasi dengan pedagang pengecer tentang pemberian informasi data yang benar
- e) Berkoordinasi dengan Poktan dan menyampaikan bahwa pembangunan sarana penunjang dapat diberikan bertahap oleh pemerintah dan persyaratan hibah tanah harus lengkap
- f) Berkoordinasi dengan poktan bahwa pengisian gabah lebih diutamakan swadaya dari kelompok terlebih dahulu dan bantuan dari pemerintah hanya bersifat stimulan
- g) Berkoordinasi dengan calon penyedia mesin Bed Dryer/RMU untuk menentukan harga yang sesuai dengan Pagu anggaran yang tersedia dan Memberikan pemahaman pada masyarakat (poktan) bahwa bantuan penyediaan infrastruktur pendukung lumbung pangan (Bed dryer/RMU) lebih diutamakan swadaya dari kelompok terlebih dahulu dan bantuan dari pemerintah hanya bersifat stimulan
- h) Berkoordinasi dengan anggota kelompok yang mengikuti kajitiru
- i) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, pengolahan dan penyimpanan makanan harus dilakukan dengan baik
- j) Peningkatann ketrampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal, untuk peningkatan pemenuhan pangan yang dibutuhkan tubuh.

- k) Terlaksananya promosi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan B2SA yang dilaksanakan dengan gerakan penyuluhan, sosialisasi, kampanye, pameran dan sarana percontohan rumah pangan B2SA di Desa, Lomba Cipta Menu B2SA
- l) Koordinasi dengan lintas instansi terkait agar kegiatan sosialisasi keamanan pangan lebih ditingkatkan
- m) Melakukan bimtek laminasi kapal penangkapan ikan

Belum dilaksanakan/tidak disertai bukti dukung :

- a) Penambahan rapid test kit (alat uji sampel) atas risiko Kurangnya jaminan pangan yang aman dan bebas dari zat berbahaya
 - b) Melaksanakan bimbingan teknis/ pelatihan untuk petugas teknis berdampak pada hasil uji sampel yang kurang akurat
 - c) Fasilitasi Pengukuran Kapal Nelayan
 - d) Melaksanakan Patroli bersama Satpolairud Tanah Laut
 - e) Melaksanakan pendataan sumber daya ikan
 - f) Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan
- agar Rencana Tindak Pengendalian yang belum berjalan/belum disertai bukti dukung agar direalisasikan pada triwulan selanjutnya (Triwulan IV)

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Rencana Tindak Pengendalian yang disusun telah dilakukan, yaitu :

- a) Mengikut sertakan ASN sesuai dengan kebutuhan SKPD (Diklat PPNS Diklat Damkar 1)
 - b) Membuat SOP terkait pelayanan warga yang memperoleh kerugian materiil (keruswakan akibat penegakan Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) masih minim
 - c) Mengevaluasi kembali SOP yang sudah disusun
- Terhadap RTP yang telah berjalan, agar tetap dilaksanakan secara intensif sehingga risiko yang teridentifikasi dapat diatasi dan tidak muncul kembali menjadi risiko di tahun yang akan datang.

6. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan

Rencana Tindak Pengendalian yang disusun telah dilakukan, yaitu :

- a. Melakukan pembinaan ke Koperasi dan Bimbingan teknis

- b. Pedagang tidak membayar retribusi pelayanan pasar dan juru pungut retribusi pelayanan pasar berhalangan datang ke pasar.
 - c. Jemput bola timbangan pedagang yang akan dilakukan tera - tera ulang
 - d. Melaksanakan Sosialisasi Kemetrolagian langsung kepada pedagang sebelum pelaksanaan sidang tera tera ulang
 - e. Meningkatkan kesadaran Pedagang dalam menaati peraturan perda dan Meningkatkan pengawasan dan penertiban oleh petugas wastib pasar.
 - f. Meningkatkan kesadaran Pedagang dalam membayar retribusi pasar dan meningkatkan kesadaran Pemungut dalam memungut retribusi pasar
- agar Rencana tindak pengendalian untuk risiko tahun 2024 yang sudah berjalan, tetap dilaksanakan secara intensif sehingga risiko yang teridentifikasi dapat diatasi dan tidak muncul kembali menjadi risiko di tahun yang akan datang.

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rencana Tindak Pengendalian sudah berjalan, yaitu :

- a) Akan mengumpulkan pelaku usaha yang lokasinya searah di suatu tempat guna efisiensi
- b) Akan menambahkan jumlah unit alat transportasi
- c) Akan melaksanakan Bimtek dan sosialisasi LKPM
- d) Akan meningkatkan pemahaman pengguna layanan saat pengisian survey melalui website dan petugas
- e) Koordinasi dengan SKPD Teknis dalam penyelenggaraan Perizinan berusaha di daerah terkait dengan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Tanah Laut.
- f) melaksanakan studi banding kepada daerah lain dan meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan kajian/penelitian

agar Rencana tindak pengendalian untuk risiko tahun 2024 yang sudah berjalan, tetap dilaksanakan secara intensif sehingga risiko yang teridentifikasi dapat diatasi dan tidak muncul kembali menjadi risiko di tahun yang akan datang.

8. Kecamatan Pelaihari

Rencana Tindak Pengendalian yang sudah berjalan, yaitu :

- a) Melakukan koordinasi intensif dengan pihak yang berkepentingan atas risiko Pemahaman kelompok organisasi atas penyusunan laporan realisasi hibah atas risiko Penyelenggaraan Pelatihan Penentuan Batas Desa Belum Optimal
- b) mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait

- c) Perlunya koordinasi di awal perencanaan atas risiko Tidak maksimalnya realisasi anggaran karena Musrenbang dilaksanakan perdapil

Pada triwulan 3 (tiga) Rencana Tindak Pengendalian yang ada belum bisa menghilangkan risiko atas :

- a) dana hibah yang tidak terealisasi 100 %, karena harga tiket pesawat (Akomodasi) Pengisi acara kegiatan hibah lebih rendah daripada RAB, sisa belanja telah dikembalikan.
- b) Penyelenggaraan Pelatihan Penentuan batas desa belum optimal
- c) Tidak maksimalnya realisasi anggaran karena Musrenbang dilaksanakan perdapil

Atas 3 (tiga) risiko diatas, agar melakukan evaluasi untuk mencari alternatif Rencana Tindak Pengendalian yang lebih efektif, atau menjalankan Rencana tindak pengendalian yang ada dengan lebih intensif, sehingga risiko yang ada bisa teratasi. Sedangkan Rencana Tindak Pengendalian yang belum berjalan adalah Meningkatkan pembinaan pada pendamping desa, atas risiko keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan, agar RTP direalisasikan pada triwulan selanjutnya (Triwulan IV).

9. Kecamatan Batu Ampar

Rencana Tindak pengendalian yang sudah berjalan, yaitu :

- a) berkoordinasi dengan Pihak penerima Hibah dan pihak- pihak terkait atas risiko ada dan hibah yang tidak terealisasi
- b) Menyediakan Narasumber dari Bidang Kesra dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pelaihari atas risiko kurangnya Pemahaman kelompok organisasi atas penyusunan laporan realisasi hibah
- c) Melibatkan LPTQ Tingkat Kecamatan dan Kabupaten atas risiko Tidak maksimalnya hasil yang ingin dicapai
- d) Memastikan jumlah Petugas dari Kabupaten (Satpol PP, Dishub, Protokol) yang akan hadir atas risiko Persiapan untuk konsumsi kadang tidak terpenuhi
- e) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pelatihan Administrasi Tata Pemerintahan Desa atas risiko Penyelenggaraan Pelatihan Administrasi Tata Pemerintahan Desa Belum Optimal
- f) Intensifkan Koordinasi atas risiko keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan
- g) Pembatasan bagi Peserta yang menghadiri acara Musrenbang Kecamatan terutama dari SKPD atas risiko membengkaknya anggaran makan minum peserta

Pada triwulan 3 (tiga) terdapat risiko yang terjadi, yaitu :

- a) Peserta kegiatan terkadang tidak tepat waktu dalam berhadir

- b) Penyelenggaraan Upacara Hari Kemerdekaan RI belum optimal
- c) Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- d) Penyelenggaraan Pelatihan Administrasi Tata Pemerintahan Desa belum Optimal
- e) Keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan

Atas risiko diatas, agar agar melakukan evaluasi untuk mencari alternatif Rencana Tindak Pengendalian yang lebih efektif, atau menjalankan Rencana tindak pengendalian yang ada dengan lebih intensif, sehingga risiko yang ada bisa teratasi

10. Kecamatan Bumi Makmur

Rencana Tindak Pengendalian sudah berjalan, yaitu :

- a) Menyediakan Whats App Group untuk diskusi langsung dengan masyarakat
- b) Mengadakan rapat monitoring dan evaluasi dengan masyarakat
- c) Persyaratan dapat dilihat langsung pada sistem informasi "Si Cantik" oleh masyarakat
- d) Menyediakan grup whatsapp untuk diskusi langsung dengan perangkat desa.
- e) Mengadakan Rapat Monitoring dan evaluasi dengan perangkat desa.
- f) Memaksimalkan Pelayanan Lewat web Aplikasi "si cantik"
- g) Perlunya Koordinasi secara intensif dari SKPD Pengampu Kegiatan dengan Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan
- h) Melaksanakan Koordinasi dengan Kantor Pajak terkait Sistem Penetapan dan Pembayaran Pajak sesuai dengan Jenis Pajak

Rencana Tindak Pengendalian yang sudah berjalan, agar tetap dilaksanakan secara intensif sehingga risiko yang teridentifikasi dapat diatasi dan tidak muncul kembali menjadi risiko di tahun yang akan datang.

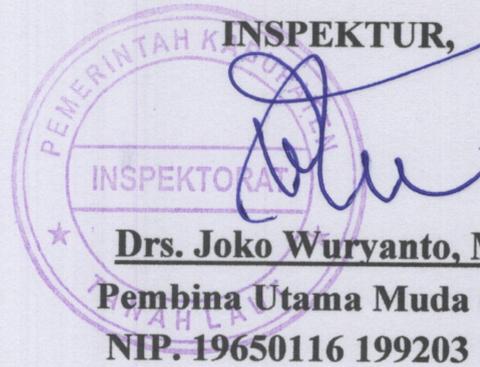
E. REKOMENDASI

Sehubungan dengan hasil monitoring di atas, disarankan kepada Kepala SKPD Wilayah Irban III untuk :

1. Melengkapi bukti dukung Pemantauan RTP Triwulan 3 sesuai dengan catatan hasil pemantauan RTP Triwulan 3 Tahun 2024
2. Melakukan pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian yang belum dilaksanakan setiap triwulan.

F. PENUTUP

Demikian Laporan Monitoring Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risk Register SKPD Wilayah Irbab III Triwulan 3 (Tiga) disampaikan agar dapat ditindaklanjuti dan digunakan sebagaimana mestinya.


INSPEKTUR,

Drs. Joko Wuryanto, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650116 199203 1 008

Lampiran :

1. Inspektur Kabupaten Tanah Laut
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut
6. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut
8. Camat Pelaihari
9. Camat Batu Ampar
10. Camat Bumi Makmur